

ANALISIS TEORI STABILITAS HEGEMONI TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP QATAR

Salama Alkatiri

**Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia**

Email : pkm.sapphire@gmail.com

Abstrak

Pada Juni 2017, Arab Saudi bersama negara teluk lainnya Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Saudi menuding Qatar kerap aktif dalam mendukung terorisme dan ekstrimisme di kawasan. Selain itu, kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki di bidang ekonomi dan militer menjadi alasan kuat Saudi memutuskan hubungan tersebut. Namun, penulis berasumsi bahwa konflik diplomatik tersebut diakibatkan oleh adanya ketakutan Saudi akan munculnya kekuatan baru di kawasan yakni Qatar, yang dilihat dapat membahayakan posisi Saudi sebagai negara hegemonik di Timur Tengah. Ketakutan itu berdasar atas peningkatan ekonomi dan militer Qatar. Tulisan ini akan membahas kasus tersebut menggunakan Teori Stabilitas Hegemoni dari Robert Gilpin dan Konsep Hegemoni dari Antonio Gramsci untuk menganalisa alasan-alasan dari pemutusan hubungan diplomatik Saudi terhadap Qatar dari segi kepentingan Saudi sebagai negara dominan untuk mempertahankan statusnya sebagai hegemon kawasan. Di mana Saudi menilai Qatar memiliki kapabilitas sebagai ancaman bagi dominasinya dan keseimbangan *status quo* di kawasan Timur Tengah. Penulis mengidentifikasi tiga variabel yang dapat mengancam dominasi Saudi, yakni ancaman terhadap dominasi ekonomi; ideologi-budaya; dan keamanan politik.

Kata Kunci: Arab Saudi, diplomatik, hegemonik, Teori Stabilitas Hegemoni, Qatar

Abstract

In June 2017, Saudi Arabia and other Gulf countries such Bahrain, United Arab Emirates and Egypt suddenly broke their diplomatic relations with Qatar. Saudi accused Qatar of being active in supporting terrorism and extremism in the region. In addition, the closeness of relation between Qatar with Iran and Turkey in the economic and military fields was another strong reason for Saudi to cut off the diplomatic relations. However, the author assumes that the termination of diplomatic relations was due to Qatar's emergence as a new power in the region, which is seen as endangering to Saudi positions as the hegemonic state in the Middle East. It is based on the improvement of Qatar's economy and military fields. This paper will discuss the issue addressed by using the Hegemonic Stability Theory by Robert Gilpin and the Hegemonic Concept of Antonio Gramsci to analyze the reasons behind Saudi's action, in terms of his interests as the hegemonic state to maintain its status as a regional power. Where Saudi claimed Qatar has capability as a threat to its dominance and status quo balance in Middle East. The author identifies three variables that could threatens Saudi's dominance, which are a threat to economic dominance; cultural-ideology; and political security.

Keywords: Saudi Arabia, diplomatic, hegemonic, Hegemonic Stability Theory, Qatar

PENDAHULUAN

Pada Juni 2017, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang diikuti oleh beberapa sekutunya seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir yang membuat situasi di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Dalam ilmu Hubungan Internasional putusannya hubungan diplomatik antara dua negara pada dasarnya mungkin saja terjadi. Keputusan ini biasanya ditandai dengan tingkat kualitas hubungan yang makin lama semakin berkurang dan sampai pada suatu keadaan yang tidak baik dan diakhiri dengan pemutusan hubungan (Starke 1989, 583). Beberapa alasan yang menyebabkan berakhirnya hubungan diplomatik antar negara adalah karena pecahnya perang antara negara-negara tersebut. Namun, terdapat juga negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak, yang dapat disebabkan karena adanya protes atau ketidaksetujuan terhadap tindakan ilegal dari negara pengirim (Adwani 2015, 161-162). Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan suatu hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Namun pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar menjadi pertanyaan publik, karena sebelumnya hubungan Saudi dan Qatar dalam keadaan baik. Bahkan Qatar membantu Saudi dalam melakukan intervensi terhadap Yaman atas konflik al Houthi pada 2015 silam. Akibat dari pemutusan hubungan diplomatik ini tampaknya akan berimbas secara tidak langsung kepada posisi Qatar di Timur Tengah.

Arab Saudi dan sekutu secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik mereka atas tudingan Qatar sebagai negara yang aktif mendukung terorisme dan ekstremisme, dan mendukung propaganda yang kerap dimuat oleh Al-Jazeera (BBC Indonesia, 2017). Qatar dinilai telah melanggar perjanjian negara-negara teluk dan berani dalam mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin (Kumparan, 2017). Dukungan untuk Hamas membuat Qatar berselisih dengan banyak negara, seperti Amerika Serikat, yang memandang Hamas sebagai organisasi teroris. Imbas dari tudingan-tudingan tersebut berujung pada blokade darat, laut, dan udara yang dilakukan Saudi dan sekutu terhadap Qatar dan juga pemutusan hubungan diplomatik atas dasar alasan keamanan regional (Kumparan, 2017).

Pemicu Arab Saudi mengambil 'jalan keras' terhadap hubungan diplomatiknya dengan Qatar tampaknya diakibatkan oleh adanya pernyataan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dalam pidatonya saat upacara militer yang menyebutkan bahwa Iran adalah '*great power*' di kawasan Timur Tengah (BCC Indonesia, 2017). Besar kemungkinan jika Arab Saudi tidak sependapat dan tidak terima akan pernyataan tersebut. Namun, Qatar mengatakan bahwa telah terjadi suatu kampanye hasutan berdasarkan tuduhan yang sepenuhnya merupakan rekayasa. "Kampanye media (melawan Qatar) gagal meyakinkan opini publik di wilayah ini dan di negara-negara Teluk khususnya, yang menjadi sebab terus meningkatnya ketegangan,"

kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan (BBC Indonesia, 2018). Menurut Qatar, pemutusan hubungan diplomatik ini 'tak bisa dibenarkan' dan 'tidak didasarkan pada fakta-fakta'(BBC Indonesia, 2017).

Ditambah lagi atas 13 syarat normalisasi Arab Saudi dan sekutu yang mengajukan agar Qatar bisa terbebas dari blokade. Beberapa syarat diantaranya adalah Qatar harus memutus dukungan terorisme dan memutus hubungan dengan Iran dan Turki, akan tetapi Qatar menolak untuk patuh terhadap Arab Saudi. Qatar beranggapan bahwa Arab Saudi mencoba untuk mendominasi kawasan dan menuding tuntutan Saudi tersebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar (BBC Indonesia, 2017).

Penulis melihat adanya ketakutan Arab Saudi akan munculnya kekuatan baru di kawasan yakni Qatar, yang dilihat dapat membahayakan posisi Arab Saudi sebagai negara dominan di Timur Tengah. Ketakutan itu berdasar atas peningkatan ekonomi dan militer Qatar. Faktanya, Qatar menggunakan LNG sebagai medium untuk mendongkrak perekonomian mereka. Tingkat pertumbuhan ekonomi Qatar tumbuh sebesar 2,7% hingga akhir 2016. Dengan cadangan LNG mencapai 900 triliun kaki kubik, Qatar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Penerimaan dari minyak dan gas membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari US\$100.000, jauh melampaui Amerika Serikat atau Inggris (BBC Indonesia, 2017). Pada akhirnya, merubah Qatar menjadi negara kaya dengan stabilitas ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sangat memungkinkan jika pemutusan hubungan diplomatik sepihak tersebut dipicu oleh peningkatan ekonomi, perbedaan ideologi dan keamanan politik kawasan yang ditakuti oleh Saudi akan mengancam statusnya sebagai kekuatan hegemonik di Timur Tengah.

Kajian akademik mengenai krisis diplomasi antara Saudi dan Qatar umumnya menekankan pada tiga sudut pandang yakni (1) Kebijakan Luar Negeri Qatar; (2) Kebijakan Kawasan Arab Saudi; dan (3) Kebijakan negara GCC. Sudut pandang pertama, kajian kebijakan luar negeri Qatar melihat dari respon dan kapabilitas Qatar sebagai *small-state* terhadap peningkatan kekuatannya di kawasan. Ketika terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya pada 2017, Qatar mengubah haluan politik kawasan dan kebijakan luar negerinya untuk mencari perlindungan dengan Iran dan Turki (Pradhan, 2018). Hal tersebut dilakukan Qatar untuk mengantisipasi adanya intervensi dari Arab Saudi dan sekutu. Kebijakan luar negeri Qatar menjadi instrumen penting dalam menjalankan perannya sebagai negara yang tengah maju. Qatar sebagai negara kecil di teluk memiliki cara tersendiri dalam menjalankan mekanisme politiknya di kawasan, yang membuatnya menjadi aktor diplomatik yang berpengaruh di Timur Tengah. Akibat dari kebijakan luar negerinya yang sangat '*flexible*' dan pengaruh Qatar di kawasan, membuatnya menjadi ancaman terhadap posisi Saudi di teluk (Khatib, 2014; Rabi, 2018; Mohammadzadeh, 2017; Roberts, 2012).

Qatar yang telah memainkan peran diplomatik yang unik di Timur Tengah sebagai perantara perdamaian dan moderator regional, serta dikenal sebagai negara yang selalu menjadi mediator dalam beberapa konflik yang ada baik di kawasan maupun di beberapa wilayah Afrika, membuatnya menjadi negara yang cukup disegani. (Cooper&Momani, 2011; Kamrava; 2011). Namun, akibat dari kebijakan luar negerinya yang dinilai '*Maverick*' atau tidak konvensional, Qatar membedakan dirinya dengan negara-negara teluk lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hubungan bilateral Qatar dengan Israel dan Iran dalam bidang ekonomi dan militer tetapi dilain sisi Qatar juga menjalin hubungan politik dengan negara-negara teluk (Cooper&Momani, 2011).

Pasca tragedi 11/9, negara-negara di Teluk termasuk Qatar menggunakan diplomasi berbasis agama dalam menjalin hubungan diplomatik mereka dengan AS. Hal ini dinilai dapat membantu dalam memperbaiki citra negara-negara Arab di Barat (Fahy, 2018). Selain itu, sebagai negara yang sedang bangkit, Qatar menggunakan *soft power* sebagai kekuatan pendukung untuk memperbaiki citra ekstremis dan juga menyeimbangkan daya tarik untuk tujuan populis Arab (Roberts, 2016). Kekuatan lunak Qatar pada umumnya telah banyak membantu dalam mempromosikan kepentingan negara dan kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Hal ini telah membantu Qatar dalam meningkatkan reputasi globalnya sebagai warga negara internasional yang progresif (Dorsey, 2015). Dalam membuat kebijakannya Qatar dan negara teluk lainnya diketahui mengadopsi sistem kafala, yang digunakan untuk menjaga kepuasan ekonomi warga negara, tetapi dilain sisi juga berfungsi untuk mempertahankan stabilitas politik dan sosial di kawasan (Babar, 2015).

Sudut pandang kedua, kajian kebijakan kawasan Arab Saudi berfokus kepada bagaimana peran dan tindakan Saudi terhadap ancaman dan perubahan hirarki di kawasan. Kebijakan kawasan Saudi dalam menanggapi tantangan merupakan hal yang sangat penting sebagai kekuatan kawasan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aksi Saudi dalam mempertahankan pengaruh dan kuasanya di Timur Tengah. Saudi yang mendapati peningkatan kekuatan Iran di kawasan telah merubah haluan keamanan politik dan kebijakan luar negerinya untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan (Umer, 2017). Konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh Saudi untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan regional (Ehteshami, 2018).

Yang terakhir, kajian dari sudut pandang kebijakan negara GCC yang membahas mengenai kerjasama atau aliansi negara teluk dalam menanggapi konflik kawasan. Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, negara yang tergabung dalam GCC cenderung beraliansi dengan negara yang memiliki kekuatan militer lebih kuat. Hal ini dibuktikan dengan loyalitas GCC kepada Saudi terhadap tindakan Saudi atas pemutusan hubungan diplomasinya dengan Qatar (Ashford, 2017). Seperti halnya, terjadi pasca *Arab Springs* pada tahun 2011, negara-negara GCC menjadi subjek geopolitik melalui dukungannya terhadap

Kebijakan AS dalam mengisolasi Iran. GCC mendapatkan keuntungan atas konflik kawasan dengan Iran setelah mendapatkan manfaat dukungan dari AS dan munculnya kekuatan *soft power* Qatar (Shayan, 2013).

Pilihan orientasi kebijakan luar negeri Qatar dan Arab Saudi sangat berbeda, meskipun kedua negara ini berasal dari kawasan dan sejarah politik yang sama. Namun, Qatar yang lebih progresif dan Saudi yang masih konvensional menjadikan keduanya memiliki cara berbeda dalam menjalankan kepentingan nasional mereka. Qatar sebagai negara kecil yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang sangat baik, tumbuh menjadi kekuatan baru di kawasan. Pada akhirnya, membuat Saudi melihat hal tersebut sebagai ancaman atas peran dan posisinya sebagai pemegang kekuatan kawasan di Timur Tengah. Menurut penulis, hal ini lah yang kemudian menarik untuk dibahas, untuk mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang diberikan oleh Qatar terhadap Saudi, sehingga terjadinya pemutusan hubungan diplomatik tersebut. Jika penelitian sebelumnya membahas tentang kebijakan luar negeri dari kedua negara dan institusi kawasan, maka penting juga untuk menganalisis alasan dibalik pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Saudi terhadap Qatar.

Berdasarkan pemaparan kajian diatas, peneliti mengambil fokus penelitian pada Arab Saudi dan Qatar. Tampaknya, Qatar yang berhasil meningkatkan negaranya menjadi kekuatan baru di kawasan menyebabkan Saudi memandang Qatar sebagai kompetitor regional mereka. Puncak dari kekhawatiran Saudi adalah pemutusan hubungan diplomatik sepihak dengan juga menggiring negara-negara yang tergabung di dalam GCC untuk mendukung keputusannya. Maka pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan dalam tulisan ini adalah mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tahun 2017? Peneliti akan menggunakan Teori Stabilitas Hegemoni (TSH), untuk menganalisa alasan-alasan dibalik pemutusan hubungan diplomasi tersebut. Di bagian berikutnya, tulisan ini secara berturut-turut akan menjelaskan mengenai metode penulisan, asumsi dasar dari TSH, dilanjutkan dengan pembahasan teoritis mengenai ancaman-ancaman yang diberikan Qatar terhadap hegemoni Saudi, dan diakhiri dengan penutup.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif historik, pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan deskriptif historik merupakan pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan dengan kejadian masa lampau untuk menguji kebenaran suatu isu yang berkaitan dengan sebab akibat atau kecendrungan kejadian-kejadian yang dapat membantu menggambarkan atau menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian dimasa yang akan datang. Pendekatan ini menggambarkan kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran

masyarakat sekarang (Martono 2015, 5). Alasan utama penulis menggunakan pendekatan ini karena, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi ancaman-ancaman yang diberikan Qatar secara kronologis yang pada akhirnya berpengaruh kepada tindakan Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman terdiri dari tiga tahapan, yakni *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Reduksi data berarti merangkum, memilah poin-poin penting sehingga memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data. Setelah direduksi, data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, grafik dan lain-lain. Tahap terakhir adalah menyimpulkan semua hasil yang telah dilakukan sebelumnya sehingga akan terlihat temuan baru dalam penulisan (Sugiyono 2012).

PEMBAHASAN

Teori Stabilitas Hegemoni (TSH)

Teori Stabilitas Hegemoni (TSH) merupakan teori yang menekankan pada pentingnya peranan negara besar sebagai kekuatan hegemon yang dapat menetapkan tatanan dan stabilitas dan perdamaian dunia. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan TSH dari sudut pandang neorealisme. Salah seorang tokoh ternama perspektif neorealis adalah Kenneth Waltz, menurutnya kekuatan hegemon berperan dalam membentuk dan mempertahankan peraturan, norma, serta nilai-nilai yang universal. Tanpa kehadiran negara hegemon, ekonomi dunia liberal masih dapat tetap tumbuh, namun tidak dapat berkembang secara maksimal. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hegemon apabila berhasil mentransformasikan sistem yang sudah ada dan menerapkan nilai-nilai yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain (Arrighi 2006, 27-84). Oleh karena itu, di dalam sistem internasional dibutuhkannya negara hegemon yang berperan sebagai stabilitator. Selanjutnya, Robert Gilpin menyempurnakan teori ini dengan mencenderungkan dirinya kepada negara sebagai aktor yang menentukan keberlangsungan dari sistem internasional. Keberadaan hegemon dalam sistem internasional yang anarki menciptakan perekonomian internasional yang lebih terbuka dan kondusif dikarenakan adanya sebuah kekuatan dominan yang mengatur. Menurut Gilpin, stabilitas dunia dapat tercipta jika ada satu kekuatan hegemonis yang memiliki kekuatan militer maupun ekonomi yang tidak dapat diimbangi oleh negara manapun.

Oleh karenanya, di dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan perspektif neorealisme dari Robert Gilpin untuk membantu dalam menganalisa alasan dibalik pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh hegemon terhadap negara yang memberi ancaman. Teori ini digunakan oleh penulis untuk

memahami peran hegemoni dalam mempertahankan hegemoninya di kawasan. Hegemon yang mempertahankan kedudukannya dari ancaman dipicu oleh keinginan mereka untuk mempertahankan stabilitas / *status quo* di kawasan. Gilpin berupaya untuk mengkombinasikan studi politik internasional dengan kekuatan ekonomi internasional. Gilpin beranggapan bahwa ketika negara hegemon mengalami disintegrasi dalam kekuasaannya hal itu disebabkan oleh munculnya ancaman pertumbuhan ekonomi dan politik dari negara lain (Gilpin 1987, 71-73). Bagi THS negara adalah *power seeker* yang mana mereka sadar akan pentingnya keamanan, bukan karena sifat dasar manusia tetapi lebih disebabkan karena struktur sistem internasional yang mengharuskan mereka melakukan demikian.

THS dari neorealis juga memiliki asumsi lain mengenai kemungkinan terwujudnya *open world economy*, asumsi ini berdasar kepada konsep *common good* dari neoliberalis. Asumsi ini didasarkan atas kapabilitas negara *super power* untuk mempromosikan liberalisasi tanpa mengancam keamanan negara. Menurut Gilpin, sistem *open world economy* dapat membantu negara hegemon dalam membuat negara lain mematuhi norma dan aturan yang ditetapkan termasuk membuka perdagangan (Gilpin 1987, 74). Teori ini juga menjelaskan bahwa kekuasaan hegemon tidaklah abadi. Negara hegemon dapat mengalami penurunan yang cenderung untuk diasosiasikan dengan penutupan pasar, ketidakstabilan, dan penciptaan kompetisi blok-blok regional (Milner 1998). Namun, karena peneliti melihat jika penjelasan Gilpin saja tidak cukup untuk memahami alasan hegemon dalam menjaga hegemoninya. Dengan itu, peneliti menggunakan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci untuk melengkapi penjelasan Gilpin agar lebih mudah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman yang diberikan oleh *threatening state* terhadap dominasi hegemon dari segi ekonomi, ideologi dan politik.

Asumsi dasar dari TSH adalah bahwa ekonomi liberal yang terbuka memerlukan keberadaan seorang hegemoni atau kekuatan dominan. Negara yang dominan tersebut diharapkan mampu untuk membuat peraturan yang nantinya dapat dipatuhi oleh pihak yang terhegemoni. Norma-norma dan aturan yang dibuat oleh hegemon dianggap sudah mewakili keputusan dari semua negara terkait (Cohn 2012). Menurut Gramsci, peran fundamentalis dari negara hegemon ditujukan untuk mengamankan sistem internasional dengan pengaruh besar kekuatan militernya dan secara pasif mendorong negara lain untuk bekerja sama. Kekuatan hegemon ini menggunakan pengaruhnya dan mengubah sistem interdependensi untuk keuntungannya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut ada kemungkinan eksploitasi yang dapat dilakukan negara hegemoni terhadap negara non-hegemon. Eksploitasi disini terjadi karena negara hegemon dapat membentuk struktur sistem yang menguntungkan dirinya sendiri serta memaksa negara - negara lain untuk patuh terhadap sistem yang telah ditetapkan (Gramsci 2007, 26).

Selanjutnya, konsep hegemoni Gramsci juga dijelaskan kembali oleh Szayna et al, menurutnya ketika ada satu negara yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari hegemon, dan hegemon memperkirakan bahwa negara itu dapat mencapai keseimbangan dimasa mendatang. Maka hegemon akan melihat negara itu sebagai ancaman bahkan jika negara tersebut adalah sekutu, kemungkinan besar curiga. Dalam kondisi daya dominan ada kecenderungan kuat bagi hegemon untuk lebih waspada terhadap *the rising power* daripada negara-negara lain disekelilingnya. Satu negara yang ingin naik menjadi hegemon didasari oleh ketidakpuasannya dengan *status quo*, dan potensinya untuk mengejar jalur yang mengarah ke kompetisi dan rivalitas dengan hegemon. Sumber motivasi dari negara tersebut mungkin didasari oleh kepemimpinan yang agresif, doktrin militer (seperti perang preventif) dan faktor lainnya (Szayna et al 2001,57-60). Untuk lebih memahami motivasi negara hegemoni dalam mempertahankan kekuasaannya peneliti mengambil tulisan Gramsci yang mana membahas dimensi politik-ideologis ke dalam konseptualisasi hegemoni. Gramsci menyatakan bahwa alasan hegemon mempertahankan dominasinya karena adanya ancaman terhadap *economic dominance*, *cultural- ideological dominance* dan *political dominance* (Gramsci 2007, 12).

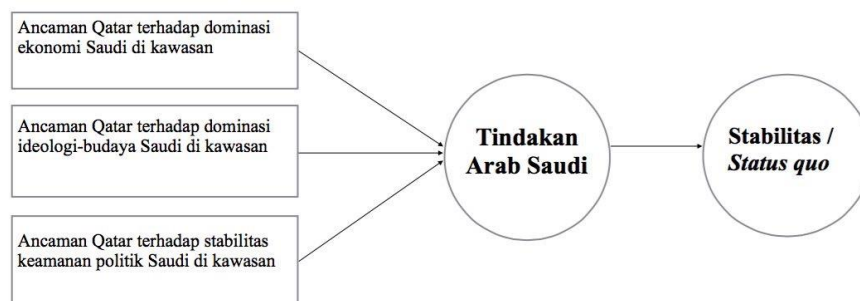
Menurut Gramsci, *economic dominance* memiliki peran yang kritical terhadap eksistensi negara hegemon. Tanpa adanya dominasi ekonomi, negara hegemon tidak dapat menjalankan sistem *open world economy* yang pada akhirnya mengacu terhadap melemahnya peran hegemon tersebut di kawasan. Selain memiliki peran yang vital terhadap posisi hegemon, dominasi ekonomi juga menentukan kekuatan hegemon tersebut. Dominasi ekonomi dikaitkan terutama dengan kekuatan finansial suatu negara. Salah satu perubahan besar pada abad terakhir adalah yang terjadi melalui peningkatan mobilitas modal. Dalam penjelasannya, Gramsci menyebutkan beberapa sektor yang dapat meningkatkan dominasi ekonomi hegemon di kawasan yakni, kemajuan teknologi, peningkatan terhadap pasar modal dan saham, serta *capital flow*. Selanjutnya, *cultural- ideological dominance* bagi Gramsci, dominasi ideologi tidak hanya tumbuh dan berkembang pada kelas pekerja yang didominasi oleh kelas pemilik modal. Melainkan kegiatan dominasi yang berlangsung di setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, lembaga agama, budaya politik dan negara. Hal ini dilakukan melalui mekanisme hegemoni. Gramsci mencatat bahwa sebuah negara menjadi hegemonik ketika negara tersebut mengartikulasikan kepentingan sektoralnya sebagai kepentingan umum, lalu menjadikan kepemimpinan moral dan politis sebagai bentuk realisasi.

Terakhir, *political dominance* menurut Gramsci dominasi politik memiliki relasi dengan *rule of law* yakni konsensus terbesar di mana kebijakan mendorong munculnya keperluan pemerintah untuk menyediakan kondisi politik dan hukum yang stabil. *Rule of law* dalam konteks modern mengacu pada lembaga dan mekanisme yang dapat memastikan kontrak yang dapat diprediksi dan dapat ditegakkan serta

mengamankan wilayah. Selain itu, dominasi politik ini juga dapat memberikan manfaat strategis yang tidak secara langsung terkait dengan peningkatan kekuatan melalui agregasi. Manfaat ini termasuk kemungkinan untuk mencapai jangkauan global "*virtual*", mengurangi jumlah lawan potensial, dan mempersulit perhitungan dan rencana strategis saingan. Memiliki sekutu yang dapat diandalkan di kawasan yang memiliki kepentingan strategis, yang bersedia memberikan pangkalan di daerah tersebut atau akan menggunakan pasukannya sendiri untuk mengejar tujuan aliansi. Dengan demikian, negara-negara dapat menggunakan sekutu mereka untuk memproyeksikan kekuasaan ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Dominasi dalam sistem ini lah yang membuat hegemon enggan untuk menyerahkan posisi mereka.

Pertanyaan paling mendasar yang dihadapi hegemon adalah bagaimana mempertahankan posisinya. Distribusi kekuatan dalam sistem internasional selalu berubah, karena kekuatan beberapa negara tumbuh lebih cepat (atau lebih lambat) dibandingkan dengan hegemon. Dalam kondisi seperti itu, hegemon ditekan untuk terus-menerus menghitung kembali rasio kekuatan dan membuat proyeksi, dengan kebijakan utama adalah bagaimana mempertahankan posisi dominannya dengan biaya terendah. Hegemon yang merasa terancam oleh kebangkitan suatu negara cenderung untuk menahan pertumbuhan negara tersebut dari segi ekonomi maupun politik (Szayna et al 2001, 51). Hegemon akan berusaha untuk mengambil suara dari negara-negara lain untuk mempertahankan *status quo* kawasan tersebut. Koersi digunakan oleh hegemon untuk menegakkan aturan yang berimbas kepada pengasingan dan intimidasi terhadap negara yang memberi ancaman. Di lain sisi, hegemon harus menggunakan insentif positif terhadap negara-negara yang bersedia berperilaku sesuai dengan aturan (Szayna et al 2001, 52). Jadi ketika hegemon berhadapan dengan ancaman yang lebih besar, negara-negara dalam sistem tersebut diharapkan dapat membantu untuk mempertahankan *status quo* hegemon dan bersatu melawan ancaman tersebut.

Gambar 1.1 Model Analisa Teori Stabilitas Hegemoni



Dengan itu, dalam penulisan ini TSH dari Robert Gilpin dan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci digunakan oleh penulis untuk menganalisa alasan dari pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar dari segi kepentingan Saudi sebagai negara dominan untuk mempertahankan statusnya sebagai hegemon kawasan. Di mana Saudi menilai Qatar memiliki kapabilitas sebagai ancaman bagi dominasinya dan keseimbangan *status quo* di kawasan Timur Tengah. Penulis mengidentifikasi bahwa ancaman Qatar terhadap Saudi berupa ancaman terhadap dominasi ekonomi; ideologi-budaya; dan keamanan politik.

Analisa Teori Stabilitas Hegemoni terhadap Pemutusan Hubungan Qatar-Saudi

Dalam bagian analisis ini, penulis akan membahas mengenai ancaman yang diberikan oleh Qatar terhadap dominasi Saudi di kawasan. Yakni ancaman terhadap; dominasi ekonomi, ideologi, dan keamanan politik. Serta alasan dan tindakan Saudi dalam menjaga dominasi dan stabilitas tersebut sebagai negara hegemon di kawasan.

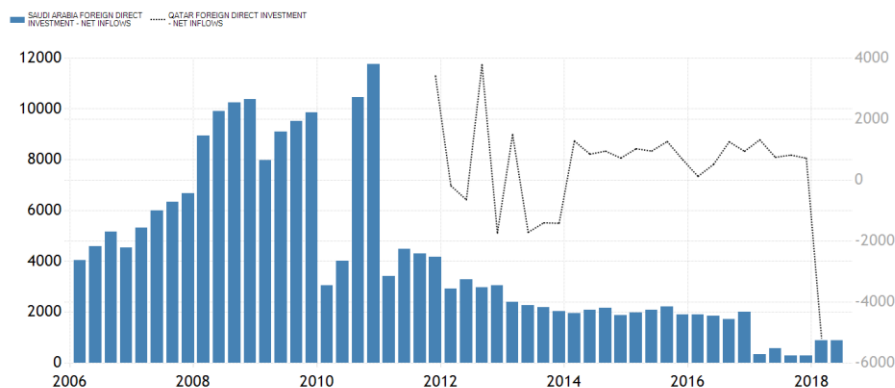
Ancaman Qatar terhadap Dominasi Ekonomi Saudi di Kawasan

Setelah mendefinisikan variabel-variabel yang menjadi acuan Saudi dalam memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar. Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis variabel-variabel tersebut dengan membaginya menjadi tiga fokus; 1. Peningkatan *Foreign Direct Investment* Qatar di kawasan; 2. Peningkatan *GDP per capita* Qatar; 3. Peningkatan produksi minyak mentah. Berdasarkan latar belakang dan data yang didapat, kemungkinan besar bahwa Saudi memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar atas dasar penurunan dominasi ekonominya di Timur Tengah. Qatar yang dilihat memiliki kapabilitas dan potensi sebagai ancaman di kawasan membuat Saudi resah akan kehilangan kedudukannya sebagai regional hegemon. Qatar yang mengalami peningkatan dalam *foreign direct investment* sejak tahun 2012 dan juga termasuk negara yang memiliki tingkat *GDP per capita* tertinggi kedua di dunia membuat Saudi tidak bisa duduk diam. Selain itu tingkat produksi minyak mentah Qatar dan Saudi juga mengalami persaingan setiap tahunnya. Bagi negara hegemon, tidak ada alasan untuk menyerahkan kedudukannya di dalam sistem hierarkinya. Arab Saudi yang berusaha untuk mengamankan posisinya sebagai *status quo-state* akan melakukan cara apapun untuk menjaga dominasi mereka. Dengan *privilege* sebagai hegemon kawasan di Timur Tengah, Saudi memiliki kemampuan akan terciptanya *open world economy*. Di dalam TSH asumsi ini pada faktanya mampu membantu meningkatkan pemasukan satu negara, pertumbuhan ekonomi dan kekuatan politik negara-negara hegemon. Dengan adanya kondisi ekonomi dunia yang terbuka hal itu akan memudahkan Saudi untuk mengatur mobilitas perdagangan minyak dan gas alam di Timur Tengah.

Saudi sebagai negara dominan di dalam sistem menyadari bahwa dengan sumber daya alam yang mereka miliki, tidak semua negara di kawasan itu memiliki kapabilitas untuk mengelola sumber daya alam mereka. Dengan itu Saudi membentuk OPEC untuk membantu negara-negara kecil lainnya mengembangkan industri mereka mengenai ekstraksi dan produksi minyak. OPEC peduli pada perkembangan ekonomi negara-negara anggotanya. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik negara-negara penghasil minyak Arab, secara individu dan kolektif. Ini berarti bahwa semua hal yang berkaitan dengan produksi dan komersialisasi minyak akan diatur dengan cara yang adil dan proporsional (OPEC 2019). Selain itu, dengan adanya OPEC, bukan saja menguntungkan negara-negara penghasil minyak lainnya, tetapi juga menguntungkan Saudi khususnya, sebagai negara hegemon yang secara tidak langsung aktor utama dalam pendirian organisasi tersebut, terutamanya dari segi perekonomian; *Foreign direct investment, crude oil production*, dan *GDP per capita* (Niblock & Malik 2007, 3).

Saudi menggunakan OPEC sebagai medium untuk menstabilkan mobilitas perekonomian di kawasan. Dengan adanya OPEC Saudi akan lebih mudah untuk mengawasi perdagangan minyak di Timur Tengah. Dengan terjadinya *open world economy* hal ini memberikan peluang bagi Saudi untuk meningkatkan dominasi ekonominya. Namun faktanya Saudi mengalami penurunan dari tingkat penanaman modal asing dan *GDP per capita*

Gambar 1.2
Foreign Direct Investment Qatar dan Saudi Tahun 2006-2018

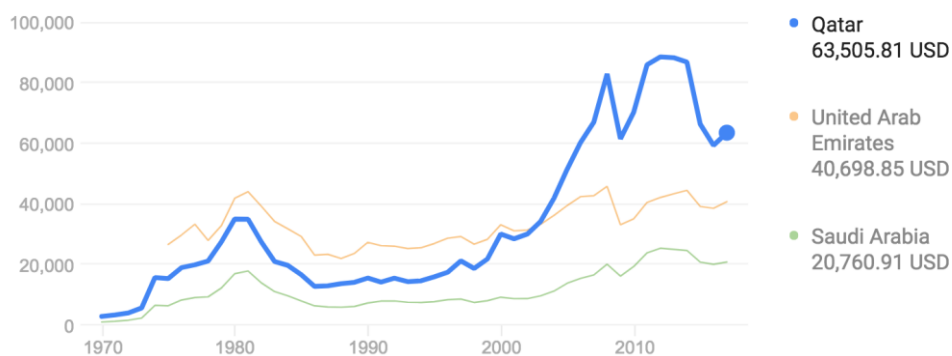


Sumber: Trading Economics, *Foreign Direct Investment*, (Saudi Arabian Monetary Agency, 2018). Terdapat di: <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/foreign-direct-investment>

Dilihat dari Gambar 1.2 yang didapatkan dari Trading Economics dapat dianalisa bahwa Saudi mengalami penurunan pada FDI mereka sejak tahun 2010. Pencapaian tertinggi Saudi yakni berkisar 11746 Juta USD pada kuartal keempat tahun 2010 dan rekor terendah mereka yakni 264 juta USD pada kuartal keempat 2017.

Dilain sisi, Qatar yang mengalami peningkatan FDI sejak awal tahun 2012 hingga 2018 menjadikannya salah satu kompetitor kawasan bagi Saudi. Pencapaian tertinggi Qatar yakni pada kuartal ketiga tahun 2012 dengan nilai sebesar 11986 Juta USD (Trading Economics, 2018). Walaupun setelahnya Qatar mengalami penurunan yang diakibatkan dari *Arab Spring* tetapi hal itu tidak seburuk yang dialami oleh Saudi. Berbeda dengan Saudi, pemerintah Qatar mengalokasikan pendapatan yang besar dari penjualan gas untuk sektor non-energi. Qatar menerapkan kebijakan keragaman produk ekonomi demi mengurangi ketergantungan perekonomian negaranya dari penjualan gas. Oleh karena itu, pemerintah Qatar membangun sektor industri, konstruksi, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan bursa saham perusahaan raksasa internasional untuk menarik pemodal asing. Pembangunan dalam setiap sektor inilah yang membantu Qatar dalam meningkatkan nilai FDI mereka, salah satunya pada sektor pariwisata. Beberapa pariwisata di Qatar seperti Pulau Buatan Palm Tree, Hotel Atlantis, Souq Waqif, Khor Al Adaid dan lain sebagainya. Bukan hanya gedung tinggi dan kemajuan teknologi yang ditawarkan Qatar kepada pelancong dan investor asing tetapi mereka juga dapat menikmati pulau-pulau eksotis yang masih sangat terjaga dan kental akan budaya timur. Berdasarkan data dari World Tourism Organization, industri pariwisata secara langsung berkontribusi sebesar 3,4 Miliar USD terhadap Qatar atau setara 1,8 persen produk domestik bruto (PDB) negara ini. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang didukung besarnya investasi di sektor ini menyebabkan pariwisata menjadi salah satu dari sumber pendapatan Qatar (UNWTO, 2019). Sedangkan, Saudi belum memiliki sektor pariwisata yang signifikan selain dengan dua kota suci yang mereka tawarkan (Mekah & Madinah).

Gambar 1.3 GDP per capita Qatar dan Saudi Tahun 1970-2017



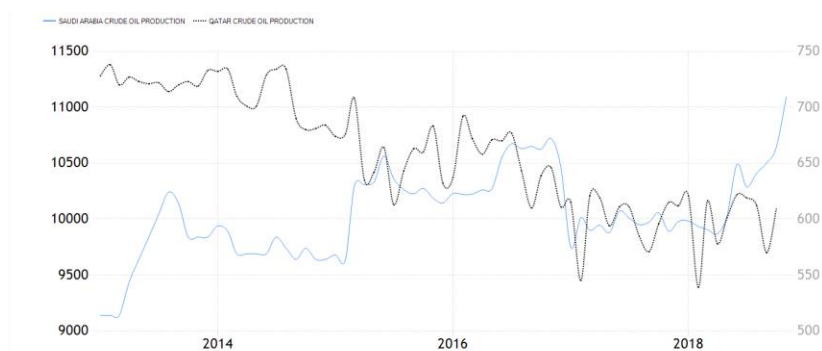
Sumber: CEIC Data, *Qatar - Saudi GDP per Capita*, (CEIC Data, 2018), Terdapat di: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/qatar/gdp-per-capita>

Berdasarkan dengan pemaparan data pada Gambar 1.3 dapat dianalisa bahwa Qatar sejak tahun 1970 sudah mengungguli Saudi atas pendapatan per kapita negara mereka. Investasi besar di sektor gas dan

pemanfaatannya untuk pembangunan negara menyebabkan Qatar berubah dari negara miskin menjadi negara dengan tingkat GDP tertinggi di dunia pada paruh kedua dekade pertama abad ke-21. Pada 2017 lalu, Qatar menjadi negara peringkat pertama yang memiliki GDP per capita tertinggi, dengan pendapatan per kapita sebesar 63.505,81 USD. Sedangkan, Saudi berada peringkat kedelapan dengan pendapatan per kapita sebesar 20.760,91 USD. Menurut David Pilling, pendapatan perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan suatu negara untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang. Pendapatan per kapita juga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Dapat juga menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara (Philling 2018, 3).

Dengan itu dapat diasumsikan bahwa Qatar memiliki tingkat kesejahteraan dan *equality* lebih tinggi dibanding dengan Saudi. Parameter ekonomi seperti produk domestik bruto yang sangat tinggi diikuti dengan tidak adanya masalah di bidang pengangguran, kemiskinan dan inflasi menunjukkan posisi penting perekonomian Qatar di arena internasional. Selain itu, negara Arab ini menjadi pemain penting di tingkat dunia. Qatar juga terbilang sukses menjalankan sektor pariwisata, dan bidang pendidikan dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pariwisata Qatar menyumbang 1.8 % dari GDP negara ini. Berbeda dengan kebanyakan negara Arab, Qatar tidak menyandarkan pendapatan negaranya dari sektor minyak, tapi dari gas alam. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari OPEC-Gas, Qatar memiliki cadangan gas lebih dari 25 Triliun meter kubik, yang menempatkan negara ini sebagai pemilik gas terbesar ketiga di dunia. Sebanyak 14% pasokan gas alam dunia berasal dari Qatar. Sebanyak 80% gas alam negara ini diekspor sejak tahun 2006, yang menjadikan Qatar sebagai pengeksport LNG terbesar di dunia. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran Saudi atas kestabilan dan peningkatan ekonomi Qatar di kawasan.

Gambar 1.4. Crude Oil Production Qatar dan Saudi Tahun 2013-2018



Sumber: Trading Economics, *Crude Oil Production*, (Saudi Arabian Monetary Agency, 2018). Terdapat di: <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/crude-oil-production>

Berdasarkan dengan grafik pada Gambar 1.4 dapat dianalisa bahwa pertumbuhan produksi minyak mentah Qatar mengalami peningkatan sejak 2013, namun di pertengahan tahun 2017 Qatar mengalami penurunan penjualan minyak mentah yang tampaknya diakibatkan dari pemutusan hubungan diplomasi yang dilakukan oleh Saudi dan negara teluk lainnya. Pemutusan tersebut tampaknya berimbas kepada penjualan minyak mentah Qatar yang berdampak pada penurunan tingkat produksi *crude oil* mereka. Menurut laporan dari BCC Indonesia, Qatar jelas menjadi negara yang dirugikan dari putusnya hubungan diplomatik ini. Satu hari setelah pemutusan sepihak tersebut Indeks penjualan produksi minyak mentah Qatar memerah. Pada 4 Juni 2017, Indeks *crude oil production* Qatar ditutup di angka 9.923,6 dan pada bulan Agustus, anjlok hingga mencapai angka 9.151 (BBC Indonesia, 2019). Memerahnya indeks penjualan tersebut, adalah pertanda turunnya kepercayaan investor, terutama investor asing. Tetapi Qatar kembali bangkit dengan berusaha untuk menstabilkan penjualan minyak mentah mereka dan gas alam.

Dengan itu dapat diasumsikan bahwa Saudi memutuskan hubungan mereka dengan Qatar salah satunya diakibatkan dari ancaman Qatar terhadap dominasi ekonomi Saudi di kawasan. Rangkaian kebijakan Qatar yang berhasil mendongkrak negaranya menjadi kekuatan baru di kawasan menyebabkan Saudi memandang Qatar sebagai kompetitor regional. Tapi alih-alih belajar dari kemajuan negara lain, dan menjadikan Qatar sebagai mitranya, Saudi lebih memilih untuk menjadikan Qatar sebagai musuh dan puncak dari permusuhan tersebut adalah pemutusan hubungan bilateral yang dilakukan dengan menggiring negara lain untuk mendukungnya.

Ancaman Qatar terhadap Dominasi Ideologi-budaya Saudi di Kawasan

Konflik yang terjadi antara Saudi dan Qatar bukan hanya sekedar persoalan dominasi ekonomi ataupun tuduhan terorisme dan radikalisme yang dilontarkan oleh Saudi terhadap Qatar, tetapi akar dari konflik mereka adalah perbedaan ideologi yang sangat signifikan. Saudi yang tampaknya terancam oleh penyebaran ideologi demokrasi yang dilakukan oleh Qatar mengambil keputusan untuk membekukan media terbesar Qatar yakni Al-Jazeera. Dikarenakan Saudi melihat Al-Jazeera sebagai kendaraan politik Qatar dalam menjalankan agendanya untuk menyebarluaskan ideologi mereka. Walaupun kedua negara ini memiliki golongan agama yang sama yakni Sunni, tetapi Saudi dan Qatar memiliki perbedaan ideologi politik yang nyata. Dimana Saudi menganut sistem Monarki Absolut dan Qatar menganut sistem Monarki Konstitusional. Walaupun Qatar menjalankan sistem Monarki tetapi Qatar juga menganut dan mengembangkan demokrasi sebagai sistem politik mereka. Berdasarkan *The Permanent Constitution of the State of Qatar* pasal pertama yang menyatakan bahwa "Qatar adalah negara Arab berdaulat yang independen. Agamanya adalah Islam dan

Hukum Syariat akan menjadi sumber utama perundang-undangannya. Sistem politiknya demokratis. Bahasa Arab adalah bahasa resminya. Orang-orang Qatar adalah bagian dari bangsa Arab.” (Al Meezan 2019)

“Qatar is an independent sovereign Arab State. Its religion is Islam and the Shari’a Law shall be the principal source of its legislation. Its political system is democratic. The Arabic Language shall be its official language. The people of Qatar are a part of the Arab nation.” (Article 1)

Qatar yang diketahui ingin melakukan reformasi demokrasi terhadap sistem pemerintahannya ditentang keras oleh Saudi, dikarenakan hal itu dapat memicu terjadinya *instability* di kawasan Timur Tengah (Echague 2015, 61). Faktanya, pada tahun 1999 Qatar telah menyaksikan pemilihan pertama mereka untuk Central Municipal Council. Dimana peristiwa itu dianggap sebagai catatan sejarah besar bagi negara Arab, karena pemilihan tersebut mewakili langkah pertama negara di Timur Tengah menuju demokrasi. Qatar juga adalah negara pertama yang mendorong wanita untuk maju sebagai kandidat dalam memberikan suara dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam urusan publik dan dalam proses pengambilan keputusan (Ministry of Foreign Affairs Qatar, 2019). Selanjutnya, menurut riset The Economist Intelligence Unit’s 2016, indeks demokrasi Qatar lebih tinggi daripada negara-negara pemboikotnya (The Economist Intelligence Unit, 2019). Berdasarkan data yang didapatkan, pada Table 1.0 dapat dianalisa bahwa Qatar memiliki tingkat demokrasi tertinggi diantara negara-negara GCC lainnya yakni 135 dan Saudi berada di tingkat terendah, 159. Namun, peneliti melihat adanya kemungkinan untuk negara-negara lain ‘menyusul’ demokrasi Qatar. Seperti yang terdapat di data, Oman memiliki nilai *political participation* lebih tinggi dibanding Qatar yakni 2.78. Bahrain memiliki nilai *electrolal process and pruralism* 1.25 dan *political participation* 2.78 juga lebih tinggi dari Qatar. Sedangkan, UAE memiliki *political culture* lebih tinggi dibanding keempat negara tersebut. Hal ini menandakan kemungkinan adanya perkembangan ideologi demokrasi yang disebar luaskan oleh Qatar di kawasan Timur Tengah.

Table 1.0
Democracy Index 2016

Nama Negara	Rank	Total Penilaian	<i>Electoral process and pluralism</i>	<i>Functioning of government</i>	<i>Political participation</i>	<i>Political culture</i>	<i>Civil liberties</i>
Qatar	135	3.68	0.50	3.93	2.22	5.63	4.12
Oman	141	3.04	0.0	3.93	2.78	4.38	4.12
Bahrain	146	2.79	1.25	3.21	2.78	4.38	2.35
United Arab Emirates	147	2.75	0.00	3.57	2.22	5.00	2.94
Saudi Arabia	159	1.93	0.00	2.86	2.22	3.31	1.47

Sumber: Data diolah kembali berdasarkan informasi dan data yang disediakan di Economist Intelligence Unit

Namun, hal ini sangat bertentangan dengan ideologi yang di anut oleh Arab Saudi. Dimana Arab Saudi melihat bahwa dengan memonopoli segala aspek kehidupan masyarakat akan tercipta sebuah stabilitas politik, ekonomi dan sosial utamanya dikaitkan dengan sedikitnya peran yang muncul dalam masyarakat (Bradley 2005, 12). Yang membuat perbedaan ideologi ini sebagai *core* masalah yang paling ditakuti dan dikhawatirkan oleh Saudi dan negara-negara teluk lainnya, yakni potensi hilangnya pengaruh dan kewibawaan Saudi sebagai penguasa monarki di Timur Tengah dan keluarga bangsawan di tanah Arab. Saudi yang merasa sebagai hegemon kawasan bagi negara-negara monarki yang lebih kecil merasa takut akan berkurangnya pengaruh monarki di Timur Tengah atas isu demokrasi yang dihembuskan oleh Qatar. Apalagi peran Qatar semakin dominan di kawasan itu. Qatar yang menjadi pusat keuangan global dan memiliki *Income per capita* lebih tinggi daripada negara-negara Arab lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi penantang bagi kekuasaan Saudi di kawasan.

Dengan alasan untuk mempertahankan *status quo* dikawasan Timur Tengah, Saudi mencoba untuk membekkan sistem demokrasi Qatar dengan penutupan Al-Jazeera yang dianggap Saudi sebagai media yang mendukung Islam yang radikal. Al-Jazeera adalah salah satu media massa yang terkenal atas kritiknya terhadap pemerintahan monarki Arab Saudi. Bagi Qatar sangat sulit untuk menutup Al Jazeera karena visi awal media itu adalah untuk menjunjung demokrasi, pluralisme, anti *authorianism* dan *anti dictatorism* di kawasan Timur Tengah (Pourhamzavi & Pherguson 2015, 3). Karena itulah, Qatar bereaksi cukup mengejutkan pasca Saudi menyurati (melalui Kuwait) dengan 13 persyaratan normalisasi tersebut. Yakni satu hari kemudian Qatar meminta Turki memasok eskalasi tank ke Doha untuk bersiap siaga jika Saudi dan negara teluk lainnya melakukan serangan (Al-Jazeera, 2019). Duta Besar Qatar untuk United Nations, Sheikhha Alya Ahmed bin Saif al-Thani, menegaskan atas tuduhan bahwa negaranya mendukung terorisme “menyabotase hubungan kami dengan dunia, dengan barat, menodai reputasi kami dengan cara menggunakan kartu terorisme. Tapi tujuan utamanya adalah lebih mengkritik media kami, al-Jazeera, dan keterbukaan (demokrasi) kami.” (BBC Indonesia, 2017). Dengan itu Saudi yang merasa terancam oleh sistem monarki demokrasi yang dianut oleh Qatar membuatnya untuk memutuskan hubungan bilateralnya. Saudi yang melihat dirinya sebagai negara dominan di kawasan, sangat takut jika negara-negara teluk lainnya pada akhirnya akan tersadarkan oleh ide-ide demokrasi Qatar yang nantinya menimbulkan pemberontakan dan mengganti konstitusi monarki absolut dengan demokrasi versi Qatar. Sebelum hal itu terjadi, Saudi mencoba untuk mengamankan posisinya dengan mengiring negara-negara teluk lainnya untuk melakukan penutupan Al-Jazeera yang dilihat sebagai kendaraan Qatar dalam menjalankan sistem demokrasi mereka. Di sisi lain, Saudi mencoba untuk menjaga *status quo* yang telah ada agar tidak ada perubahan dalam sistem pemerintahan dominan mereka di Timur Tengah.

Ancaman Qatar terhadap Stabilitas Keamanan Politik Saudi di Kawasan

Alasan lain yang melatarbelakangi pemutusan hubungan Saudi terhadap Qatar karena adanya keterkaitan antara Qatar dengan Iran dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Pada tahun 2014, Qatar diduga memiliki keterkaitan hubungan politik dengan Iran. Qatar sebagai anggota GCC telah menyalahi aturan yang telah disepakati yakni negara-negara yang tergabung dalam GCC tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama bilateral maupun hubungan politik dengan Iran ataupun kelompok-kelompok teroris lainnya tanpa persetujuan bersama. Tampaknya Qatar telah merusak agenda politik Saudi yang menginginkan agar tidak ada pengaruh Iran dalam GCC.

Pada tahun 2013, Arab Saudi telah melakukan perjanjian rahasia dengan negara-negara teluk di Timur Tengah seperti Qatar, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab. Dengan dokumen perjanjian utama yang ditandatangani oleh para petinggi negara, dengan isi perjanjian yang menjabarkan komitmen negara-negara arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara. Perjanjian tersebut dinamakan dengan " Kesepakatan Riyadh" yang menjelaskan secara khusus larangan mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir serta Teroris yang mengancam kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung media antagonis yang hal ini diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berada di Qatar, dengan tuduhan bahwa media tersebut telah mendukung kelompok Ikhwanul Muslim dan kelompok – kelompok Teroris yang berada di kawasan Timur Tengah (Alam 2017, 24-25). Tetapi pada 2014, Qatar secara gamblang memperlihatkan kedekatannya dengan Iran dan mendanai kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah yang berujung pada pemutusan hubungan bilateral dengan negara-negara teluk lainnya. Saudi, Bahrain, Oman dan negara teluk lainnya menuding jika Qatar telah mendukung berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan stabilitas wilayah di Timur Tengah, termasuk Kelompok Ikhwanul Muslimin, Daesh (ISIS) dan Al-Qaida. Serta kedekatannya dengan Iran dalam bentuk kerjasama ekonomi pada bidang produksi minyak bumi dan gas alam (Echague 2015, 54-55). Seperti yang diketahui, Qatar dan Iran memiliki bersama ladang minyak dan gas di perairan Teluk Arab (Teluk Persia) yang disebut South Pars Field oleh Teheran dan North Field oleh Doha. Ladang minyak dan gas itu saat ini yang terbesar sedunia

Disebabkan Qatar telah gagal mewujudkan komitmen yang telah disepakati, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas sumpahnya sehingga Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memberikan sanksi pemutusan hubungan diplomati dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan, yakni, menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan

Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), untuk memenuhi suatu janji dan komitmen yang sebelumnya sudah tercantum dalam perjanjian "Kesepakatan Riyadh". Tetapi, faktanya Qatar menolak semua persyaratan normalisasi yang diajukan oleh Saudi dan negara teluk lainnya. Qatar tampaknya berniat untuk memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatiknya dengan Iran. Terbukti pada bulan Agustus 2017 silam, Perdana Menteri Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani telah menemui Hassan Rouhani selaku Presiden Iran di Kedutaan Besar Qatar di Iran untuk membicarakan pemulihan hubungan kedua belah negara tersebut (BBC Indonesia, 2017). Hal ini lah yang amat ditakuti oleh Saudi, ketika adanya campur tangan Iran dalam agenda politiknya. Ditambah lagi dengan pernyataan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dalam pidatonya saat upacara militer yang menyebutkan bahwa Iran adalah 'great power' di kawasan Timur Tengah (BBC Indonesia, 2017). Hal itu diasumsikan menjadi pemicu kemarahan Saudi yang telah lama menginginkan peran sebagai hegemon kawasan di Timur Tengah. Oleh karenanya, salah satu alasan Saudi dalam memutuskan hubungannya dengan Qatar yakni adanya ancaman Qatar terhadap stabilitas keamanan politik Saudi, di mana Qatar sebagai negara yang tergabung dalam GCC telah berani untuk mendukung dan berkerjasama dengan oknum yang sudah jelas diharamkan dalam perjanjian yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa alasan Arab Saudi dalam memutuskan hubungan bilateralnya dengan Qatar karena berdasarkan pertimbangan *economic dominance*, *cultural- ideological dominance* dan *political dominance*, yaitu untuk mempertahankan dominasinya dalam ekonomi, ideologi dan keamanan politik dengan itu Saudi dapat menjaga stabilitas / *status quo* kawasan di Timur Tengah. Walaupun stabilitas ekonomi yang ditopang oleh kekuatan minyak yang begitu besar dan kuat, dominasi ekonomi Saudi tidak terlepas dari ancaman negara-negara yang memiliki kesempatan untuk menandingi kekuatan Saudi di kawasan Timur Tengah, dalam kasus ini Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 lebih terlihat sebagai kekhawatiran Arab Saudi atas Qatar yang berubah menjadi negara *core* di dalam kawasan. Kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh Qatar mampu menjadikan Qatar sebagai rival kuat bagi Arab Saudi untuk mempertahankan status sebagai negara hegemon kawasan di Timur Tengah. Qatar merupakan satu-satunya negara dengan tingkat rasio kemiskinan mendekati 0%. Negara Qatar cenderung jarang mengalami dampak buruk atas inflasi global yang terjadi. Keadaan ini dikarenakan investasi-investasi

yang dilakukan oleh negara Qatar kebanyakan merupakan investasi jangka panjang. Stabilitas ekonomi Qatar ini dibuktikan dengan tidak terkenanya Qatar atas dampak yang terjadi dari Arab Spring.

Qatar juga merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang menganut Monarki Demokrasi yang dilihat Saudi sebagai ancaman bagi dominasi ideologi-budaya di Timur Tengah. Saudi yang tampaknya melihat bahwa perkembangan demokrasi yang disebar luaskan oleh Qatar melalui media mereka yakni Al-Jazeera dapat mengurangi pengaruh ideologi monarki absolut yang telah lama dianut oleh Saudi dan negara-negara di kawasan. Alasan utama Saudi dalam mempertahankan ideologi monarki tersebut karena mereka tidak ingin adanya campur tangan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan. Menurut Saudi semakin sedikit peran masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Saudi sebagai aktor utama di GCC juga mengharapkan untuk tidak adanya hubungan politik antara anggota-anggota organisasi tersebut dengan Iran. Hal ini disebabkan oleh, perbedaan ajaran agama yang mana Iran menganut Syiah yang dinilai sebagai ajaran sesat dan pendukung kelompok-kelompok teroris. Tetapi Qatar yang merupakan anggota dari GCC, melanggar sumpahnya atas dasar kepentingan negara mereka. Sebab itulah Saudi memutuskan hubungan diplomasinya dengan Qatar atas dasar stabilitas regional mereka. Saudi yang melihat Qatar sebagai ancaman bagi dominasinya di kawasan pada akhirnya mengambil jalan keras untuk memutuskan hubungannya dengan Qatar dan memberikan 13 syarat normalisasi untuk Qatar terlepas dari blokade tersebut. Walaupun Qatar menolak untuk menuruti semua persyaratan yang diberikan. Tindakan yang dilakukan Saudi ini, dinilai sebagai bentuk usaha untuk menjaga dominasinya sebagai *regional hegemon* dan *status quo* di Timur Tengah.

Berdasarkan analisa pembahasan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa baik metode jurnal maupun metode analisis berguna terhadap proses analisa alasan-alasan dibalik pemutusan hubungan diplomatik Saudi dan Qatar. Oleh karena itu, penggunaan model analisa Teori Stabilitas Hegemoni dan Konsep Hegemoni dapat membantu dalam memahami tindakan hegemon dalam mempertahankan hegemoninya dan stabilitas kawasan dari ancaman negara lain. Serta penelitian ini mampu menjadi sumber referensi acuan dan sumber pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin memperdalam mengenai kajian Timur Tengah terutama hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar di dalam studi Hubungan Internasional. Selain itu penggunaan TSH dalam konteks *regional* belum banyak di bahas dan digunakan. Secara khusus, penulis juga belum menemukan tulisan yang secara spesifik menganalisis pemutusan hubungan diplomasi menggunakan teori ini. Dengan demikian ada beberapa rekomendasi mengenai penggunaan TSH dalam isu ini, yakni:

- a. Peneliti menyarankan untuk siapa saja yang akan melanjutkan penelitian ini dapat melibatkan narasumber yang lebih kompeten dan mengadakan *one on one interview* untuk mendapatkan penge-

tahuan yang lebih dalam. Dengan itu, peneliti mengharapkan penelitian tersebut akan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami konflik Saudi-Qatar.

b. Melihat banyak Warga Negara Indonesia yang menetap maupun bekerja (TKI) di Saudi dan Qatar yang kemungkinan terkena dampak dari pemutusan hubungan diplomatik ini. Karena itu penting bagi Indonesia untuk memahami hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew F. Cooper & Bessma Momani. 2011. "Qatar and Expanded Contours of Small State Diplomacy". *The International Spectator*, 46:3, 113-128, DOI: 10.1080/03932729.2011.576181.
- Adwani, A. 2015. "Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak". *Samudra Keadilan*.
- Ashford, Emma M. 2017. "Hegemonic Blackmail: Entrapment In Civil War Intervention". *Canadian Foreign Policy Journal*. 23:3, 218-231, DOI: 10.1080/11926422.2017.1341843.
- Babar, Zahra. 2015. "Population, Power, And Distributional Politics In Qatar". *Journal of Arabian Studies*, 5:2, 138-155, DOI: 10.1080/21534764.2015.1113680.
- Bradley, John R. 2015. *Saudi Arabia Exposed: Inside a Kingdom in Crisis*, New York : Palgrave Macmillan.
- Cohn, H.T. 2012. *Theoretical Perspective on Global Political Economy: Theory and Perspective*. 6th edition. Longman:Pearson Education Inc.
- Echague, A. 2015. "Qatar: The Opportunist". Dalam Kristina Kauch et.al, ed. *Geopolitic And Democracy, In The Middle East*. Madrid,Spain:Fride Publisher.
- Ehteshami, Anoushiravan 2018. "Saudi Arabia as a Resurgent Regional Power". *The International Spectator*, DOI: 10.1080/03932729.2018.1507722.
- Fahy, John. 2018. "International Relations And Faith-Based Diplomacy: The Case Of Qatar." *The Review of Faith & International Affairs*. 16:3, 76-88, DOI 10.1080/15570274.2018.1509279.
- Gilpin, R. 1987. "The Dynamics of International Political Economy", dalam *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Gramsci, A. 2007. *Selections from the Prison Notebooks*. Q. London: Lawrence and Wishart.
- Kamrava, Mehran. 2011. "Mediation And Qatari Foreign Policy". *Middle East Journal*. 65:4, 539-556
- Karim, Umer. 2017. "The Evolution Of Saudi Foreign Policy And The Role Of Decision-Making Processes And Actors". *The International Spectator*. 52:2, 71-88, DOI 10.1080/03932729.2017.1308643.
- Khatib, Lina. 2014. *Qatar And The Recalibration Of Power In The Gulf*. Carnegie Middle East Center.
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

- Milner, H. 1998. "International Political Economy: Beyond Hegemonic Stability". *Foreign Policy*. No. 110, Spring.
- Ministry of Foreign Affairs Qatar. "System of Government". <https://mofa.gov.qa/en/qatar/political-system/general-information>, diakses pada 10 November 2018.
- Mohammadzadeh, Babak. 2017. "Status and Foreign Policy Change in Small States: Qatar's Emergence in Perspective". *The International Spectator*, 52:2, 19-36, DOI 10.1080/03932729.2017.1298886.
- Niblock, Tim Dan Malik, Monica. 2007. *The Political Economy Of Saudi Arabia*, New York : Routledge.
- Pilling, D. 2018. *The Growth Delusion: The Wealth and Well-Being of Nations*, Bloomsbury.
- Pourhamzavi, K. & Pherguson, P. 2015. *Al Jazeera And Qatari Foreign Policy: A Critical Approach*. New Zealand: University of Otago.
- Pradhan, Prasanta Kumar. 2018. "Qatar Crisis And The Deepening Regional Faultlines". *Strategic Analysis*, 42:4, 437-442, DOI: 10.1080/09700161.2018.1482620.
- Roberts, David B. 2012. "Understanding Qatar's Foreign Policy Objectives". *Mediterranean Politics*. 17:2, 233-239, DOI: 10.1080/13629395.2012.695123.
- Roberts, David B. 2016. "The Four Eras of Qatar Foreign Policy". *Comillas Journal of International Relations*. DOI: cir.i05.y2016.001.
- Salamey, Imad. 2015. "Post-Arab Spring: Changes And Challenges". *Third World Quarterly*. 36:1, 111-129, DOI: 10.1080/01436597.2015.976025
- Saudi Arabian Monetary Agency. 2018 "Trading Economics, Foreign Direct Investment". <https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/foreign-direct-investment> , diakses 25 Maret 2019.
- Shayan, Fatemeh. 2013. "Geopolitical Subjectivity In Iran-GCC Relations: The Three Islands Issue Since 1979". *Geopolitics*. 18:3, 633-661, DOI: 10.1080/14650045.2013.769961.
- Starke, J. G. 1989. *Introduction to International Law*. London: Butterworth.
- Sugiyono, P.D. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif – Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta.
- Szayna et. Al. 2001. *The Emergence of Peer Competitors: A Framework for Analysis*. . RAND Corporation.
- Rabi, Uzi. 2009. "Qatar's Relations With Israel: Challenging Arab And Gulf Norms". *Middle East Journal*, Vol. 63, No. 3 (Summer, 2009), 443-459.
- Webb, M.C., Krasner, S.D. 1989. "Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment", *Review of International Studies*, 15 (2).
- Wyatt-Walter, A .1996. "The United States And Western Europe: The Theory Of Hegemonic Stability", dalam Ngaire Woods (ed.), *Explaining International Relations Since 1945*, Oxford, UK: Oxford University Press.
- Tanpa Tahun. "OAPEC". <http://oapecorg.org/Home> , diakses pada 10 November 2018.

- . Tanpa Tahun. "UNWTO", Terdapat di <http://www2.unwto.org/> , diakses 9 April 2019.
- . 2018. "Qatar-Gulf Crisis: All The Latest Updates", *Aljazeera*, (Agustus, 2, 2018),
<https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html> di akses 10 April 2019.
- . Tanpa Tahun. "The Permanent Constitution of the State of Qatar: The State and the Basis of its Rule.
Al-Meezan. <http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2284&language=en>, diakses 25 Maret 2019.
- . 2017. "Krisis Qatar: Empat Faktor Kejengkelan Tetangga Arab". *BBC Indonesia* (Agustus, 2017),
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036>, diakses 10 November 2018.
- . 2017. "Alasan 4 Negara Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar". *BBC Indonesia*, (Juni, 2017),
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40155610>, diakses 10 November 2018.
- . 2017. "Tujuh Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik: Ada Apa dengan Qatar?". *BBC Indonesia*.
(Juni,2017), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40157225>, diakses 10 November 2018.
- . 2017. "AS: Tuntutan Negara-Negara Arab Kepada Qatar Sulit Dipenuhi. *BBC Indonesia*, (Juni 2017),
<https://www.bbc.com/indonesia/40399994>,
- . 2018. "Seabad Lalu Miskin, Bagaimana Qatar Bisa Jadi Salah Satu Negara Terkaya Di Dunia?". *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40201628>, diakses pada 10 November 2018.
- . 2017. "Qatar Pulihkan Sepenuhnya Hubungan Diplomatik dengan Iran" (Agustus, 2017), *BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46426920>, diakses pada 10 November 2018.
- . 2017. "Arab Saudi dan Sekutunya Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar". *Kumparan*. (5 Juni 2017).
<https://kumparan.com/@kumparannews/arab-saudi-dan-sekutunya-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-qatar>, diakses 10 November 2018.
- . 2017. "The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2016".
<https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/>, diakses 25 Maret 2019.